

Wagub: DKI Siap Jika PPKM Darurat Diperpanjang

JAKARTA (IM)- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap jika pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021 harus diperpanjang.

"Kami siap melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat jika ternyata dirasakan perbaikannya belum signifikan dan diharuskan untuk diperpanjang PPKM Darurat," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/7) malam.

Meski dalam 10 hari terakhir pelaksanaan PPKM darurat, mobilitas warga terpantau menurun dan angka kesembuhan juga meningkat, fatalitas masih statis. "Namun jika nanti diputuskan untuk dilanjutkan, kami akan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Namun untuk saat ini, kita berupaya yang terbaik," ujarnya.

Dalam 10 hari terakhir, kata Riza, terjadi penurunan mobilitas warga Ibu Kota selama masa PPKM darurat, bahkan menurutnya, penurunan aktivitas masyarakat lebih dari 50%.

"Mudah-mudahan mobilitas yang sudah turun sedemikian, interaksi dan kerumunan yang turun, semuanya akan memberikan dampak yang

positif," kata dia.

Riza Patria berharap penerapan PPKM darurat hingga 20 Juli dapat memberikan hasil yang baik. Politikus Partai Gerindra ini berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menaati aturan PPKM darurat dan menjalankan protokol kesehatan.

"Sampai 20 Juli, mudah-mudahan kita dapat memenuhi target penurunan yang cukup signifikan," ujar dia.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat 3-7 Juli 2021. Persentase penurunan ini dibandingkan dengan data mobilisasi masyarakat ketika PPKM mikro pada 5-9 Juni 2021.

Hasilnya, mobilitas di tempat kerja turun 17,20%. Volume lalu lintas kendaraan bermotor juga turun bebas 61,76%. Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan turun 46,66% dan penumpang antar-kota dan antar-provinsi (AKAP) merosot 59,12 persen.

Pemerintah menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Kebijakan ini untuk mengemerk angka kasus Covid-19 pasci-lebaran dan munculnya varian baru. ● yan

Depok Krisis Lahan Makam Jenazah Covid-19

DEPOK (IM)- Lahan makam khusus pasien korona atau covid-19 di Kota Depok menipis akibat tingginya angka kematian akibat covid-19 sejak beberapa bulan terakhir. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPITD) Kota Depok, Abdul Haris mengatakan semua tempat pemakaman umum (TPU) telah menipis karena tingginya kasus kematian akibat covid-19.

Kota Depok memiliki 8 TPU khusus makam jenazah covid-19 namun semuanya sudah krisis. Sebanyak 80 jenazah covid-19 dimakamkan setiap hari di lahan pemakaman khusus yang ada. Adapun 8 TPU yang dikhususkan tempat pemakaman jenazah pasien covid-19 dan sudah krisis adalah, TPU Cilangkap, TPU Cimpean, TPU Kraba Digidaya Indonesia, TPU Pasir Putih, TPU Bedahan, TPU Pondok Petir, TPU Tirta Jaya dan TPU Kali Mula 3 Gilodong.

Haris menerangkan 2 dari 8 TPU yakni TPU Kali Mula 3 dan TPU Tirta Jaya kini tidak bisa lagi digunakan karena sudah penuh terisi jenazah pasien covid-19. "Kami memakamkan dengan protokol covid-19 kurang lebih seaneh ada 80-an jenazah," katanya, Rabu (14/7).

Sejak awal pandemi melanda daerah ini, Pemerintah Kota Depok menetapkan 8 TPU sebagai tempat khusus menguburkan jenazah pasien covid-19 atau mereka yang terindikasi terjangkit pernafasan itu. "Tujuannya, menghindari penularan covid-19," ucapnya.

TPU Tirta Jaya dan TPU Kali Mula 3 saat ini telah ditutup karena telah penuh terisi pasien covid-19. Menurut Haris, menipisnya lahan pemakaman untuk pasien covid-19 mulai terjadi sejak April 2021. Dalam 1 hari pihaknya menguburkan 80-an jenazah yang meninggal akibat terpapar covid-19 tiap hari.

Angka kematian ini jauh lebih tinggi dari angka kematian tahun 2020. "Tahun 2020 kami paling banyak menguburkan 3-4 pasien per harinya. Kondisi inilah yang membuat ketersediaan lahan pemakaman jenazah pasien covid-19 di Kota Depok makin menipis," tuturnya.

Haris menyampaikan, jika kasus kematian akibat covid-19 ini terus mengalami peningkatan seperti sekarang ini, maka 3-4 bulan ke depan semua TPU tidak akan lagi bisa lagi memakamkan jenazah covid-19. ● pra

Lelah Selalu Dirazia, Pemilik Kafe di Jakbar Segel Tokonya

JAKARTA (IM)- Kafe Limitless Coffee di Jalan Raya Kebayoran Lama, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, disegel pada Minggu (12/7). Namun, pengegelan bukan dilakukan oleh petugas Satpol PP, tapi oleh pemiliknya sendiri.

"Kami Bukan Kriminal !!! Kami Hanya Menjual Kopi. Tapi Karena Peraturan Yang Selalu Menyudutkan Kami Bahkan Dipatrol Setiap Hari Dan Akhirnya Tempat Ini Kami Segel Sendiri. Semoga Karyawan Kami Tidak Menjadi Kriminal Setelah Dirumahkan". Demikian tulisan yang tertera pada spanduk pengegelan di depan pintu Limitless Coffee.

David (28), pemilik Limitless Coffee, mengatakan, pengegelan dilakukan karena ia merasa percuma berjualan saat masa PPKM Darurat. Dengan ketatnya pembatasan, omzetnya tak bisa menutupi gaji karyawan.

Jika dirinya memperbolehkan pengunjung ngopi di tempat agar omzet bertambah, pasti kerumunan akan terjadi. Hal itu akan berujung dengan sanksi pengegelan oleh petugas Satpol PP. "Jadi mendingan saya segel sendiri sebelum ada pengegelan dari kepolisian atau Satpol PP

setempat," kata David kepada wartawan, Rabu (14/7).

David bercerita, sebelum pengegelan mandiri ini, kafanya sudah beberapa kali disatroni petugas Satpol PP dan dikenai sanksi penutupan selama tiga hari. Sebab, pengunjung kafanya selalu ramai dan dinilai melanggar protokol kesehatan (prokes).

"Cuma untuk pengegelan (sendiri) kali ini kita memang mau bikin sesuatu yang berbeda aja gitu karena kita udah capek lewatin masa-masa itu berkali-kali jadi kita mau segel sendiri tempat kita dan sementara dirumahkan dulu karyawan kita," tutur David.

David menambahkan, efek pandemi dan kebijakan PPKM Darurat ini sangat memukul para pedagang kecil. Kendati demikian, ia berharap dengan adanya aturan PPKM Darurat ini pandemi Covid-19 dapat segera berakhir. "Harapan saya ini bisa cepat berlalu biar enggak terus-terusan begini karena kasihan juga mulai dari warga kecil, itu menurut saya," ucapnya.

David dan tim manajemennya belum memastikan kapan akan kembali berjualan. Ia masih menunggu perkembangan situasi. ● pp



DAPUR UMUM BANTU WARGA ISOLASI MANDIRI

Sejumlah warga menyiapkan masakan untuk makan warga yang isolasi mandiri di kawasan Abadijaya, Depok, Rabu (14/7). Warga setempat mendirikan dapur umum secara swadaya untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19.

4 Metropolis



IDN/ANTARA

PEMROV DKI SIAPKAN GOR MATRAMAN UNTUK PASIEN COVID-19

Petugas menyiapkan tempat isolasi pasien COVID-19 di Gelanggang Olahraga (GOR) Matraman, Jakarta, Rabu (14/7). Pemprov DKI menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) hingga gejala ringan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta.

Wagub Riza Minta Pasien Isoman Tetap Koordinasi dengan RT-RW

Satgas Covid-19 akan melakukan monitoring, pemantauan, dan pengawalan dan membantu apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi mohon yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing tetap melaporkan dan berkoordinasi dengan RT, RW, puskesmas setempat atau satgas Covid-19 setempat, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM)- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta pasien Covid-19 yang melakukan iso-

lasi mandiri (isoman) di rumah masing-masing untuk menginformasikan dan tetap berkoordinasi dengan RT-RW atau Satgas Covid-19 setempat.

Pasalnya, pengawasan dan pemenuhan kebutuhan terhadap warga isoman dilakukan RT-RW setempat.

"Mohon yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing tetap melaporkan dan berkoordinasi dengan RT, RW, puskesmas setempat atau satgas Covid-19 setempat," ujar Riza pada pelaksanaan vaksinasi di Sentra Vaksinasi Universitas Budi Luhur, Jakarta, Rabu (14/7).

Riza mengatakan, satgas RT-RW dan juga puskesmas setempat

juga akan memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi warga isolasi dan dilakukan monitoring melalui sambungan handphone oleh petugas kesehatan. Jika kondisinya memburuk, maka akan dirujuk ke RS rujukan Covid-19.

"Satgas Covid-19 akan melakukan monitoring, pemantauan, dan pengawalan dan membantu apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat," tandas dia.

Menurut Riza, seharusnya pasien Covid-19 yang isolasi di rumah masing-masing tidak kekurangan obat-obat. Selain berada dalam pengawasan satgas RT-RW, kata dia, mereka sekarang juga bisa mendapatkan pelayanan telemedicine.

Dengan adanya telemedicine, tutur Riza, pasien Covid-19 bisa memesan obat secara online dan bisa melakukan komunikasi secara online dengan perawat dan dokter.

"Terkait obat sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan melalui telemedicine. Jadi masyarakat tinggal mengajukan secara online nanti segera dikirim. Harusnya tidak ada masalah dan Pak Gubernur sudah memerintahkan, menyiapkan di tiap kelurahan ada petugas-petugas yang memastikan warga bisa mengisi aplikasi telemedicine supaya warga tidak ada lagi kesulitan mendapat vitamin dan kebutuhan lain," pungkask Riza. ● yan

Pemkot Bekasi Larang Resepsi Pernikahan

BEKASI (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengeluarkan surat edaran larangan sementara acara resepsi pernikahan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor:

556/875/Set.COVID-19 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Resepsi Pernikahan di Wilayah Kota Bekasi pada Masa PPKM Darurat Pandemi Covid-19.

Hal ini menindaklanjuti Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana yang telah diubah beberapa kali.

Surat yang ditandatangani Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tersebut ditujukan kepada pengelola hotel seluruh Kota Bekasi, Ketua Asgripindo DPC Kota Bekasi, Ketua RT/RW Kota Bekasi dan khususnya masyarakat di Kota Bekasi.

"Pelaksanaan resepsi perni-

hahan ditiadakan selama PPKM darurat," kata Rahmat Effendi dalam surat edaran tersebut, seperti yang dikutip Rabu (14/7).

Selain acara hajatan, pelarangan juga ditujukan terhadap kegiatan pelatihan atau diklat yang diselenggarakan di hotel atau balai pertemuan, untuk sementara waktu.

Pengelola hotel atau gedung pertemuan dan seluruh elemen

masyarakat diminta untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama penerapan PPKM darurat. "Apabila ketentuan di atas tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dicabutnya izin operasional," imbuhnya. ● yan

MPP Akses Mempercepat Pelayanan dan Investasi



FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (tiga kiri) saat memberi pemaparan uji petik penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu di Bekasi, Rabu (14/7).

KOTA BEKASI (IM)- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dengan mengenakan baju khas Batak melakukan pemaparan uji petik penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha secara virtual, Rabu (14/7). Pada acara itu wali kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawaty, Kepala Dinas PMPTSP Kota, Lintang Dianto, dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Yogi Kurniawan.

Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), wali kota memaparkan mengenai pelayanan terpadu satu pintu yang sudah berjalan lama di Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan dan keperluan, sehingga menjadi sebuah penilaian dengan hasil terbaik untuk pelayanan di Kota Bekasi.

Menurut Pepen, sapaan akrab wali kota, Kota Bekasi

menjadi inisiasi adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di BTC Mall sebanyak 143 jenis pelayanan ditambah dengan adanya Gerai Pelayanan Publik di Plaza Cibubur dan Atrium Pondok Gede. MPP tersebut, sambungnya, adalah bentuk pelayanan untuk memudahkan warganya dengan tidak perlu report ke kantor-kantor mengurus jenis pelayanan yang telah dilengkapi di satu tempat tersebut.

Fungsi MPP, sebut Pepen, adalah mempermudah bukan hanya akses pelayanan saja akan tetapi juga sebuah akses mempercepat investasi yang merupakan proses sebuah perencanaan pembangunan kota yang memiliki nilai tambah. Komitmen membangun kemudahan pelayanan tersebut, kata dia, terealisasi sejak tahun 2018 untuk melajukan simplifikasi tata kelola pelayanan terpadu satu pintu.

"Alhamdulillah komitmen

semangat yang luar biasa pemkot mampu memberikan layanan kepastian dan perlindungan hukum. Laju pertumbuhan ekonomi luar biasa sebelum adanya covid-19," imbuh Rahmat Effendi.

Ditambahkan, adalah sebuah kolaborasi dan sinergitas antar instansi untuk sebuah proses pelayanan seperti pembuatan paspor, sertifikat tanah, bahkan sampai adanya layanan pernikahan dari Kementerian Agama.

"Intinya untuk mempermudah dan memperpendek jarak, apa yang dilakukan berimplikasi pada proses pelayanan masyarakat agar terealisasi sebuah janji kepala daerah untuk menciptakan visi misi Kota Bekasi," ujarnya.

Ia berharap, uji petik itu mampu memberikan hasil dalam pelayanan kepada warga Kota Bekasi, dengan luas wilayah sekitar 21 ribu hektar dan 2,5 juta penduduk itu. ● mdl

Penyaluran BST di Jakarta akan Dilakukan Pekan Ketiga

JAKARTA (IM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat di Ibu Kota pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui situs corona.jakarta.go.id, bantuan tersebut bakal diberikan pada pekan ketiga bulan Juli 2021.

"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke 3 bulan Juli 2021," bunyi informasi yang tertulis dalam situs itu seperti dikutip, Rabu (14/7).

Adapun penyaluran BST sebesar Rp 300 ribu itu akan ditransfer dua tahap sekaligus kepada penerima bantuan melalui rekening Bank DKI yang telah dimiliki sebelumnya dalam penyaluran bantuan pada awal tahun 2021. Nominal BST yang bakal diterima, yakni senilai Rp 600 ribu.

Penyaluran BST bagi warga DKI Jakarta terbagi menjadi dua, yakni melalui Pemprov DKI dengan menggunakan APBD, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono.

Mujiyono mengatakan, jumlah alokasi dana itu diperoleh setelah Pemprov melakukan pengalihan anggaran atau refocusing pada program sejumlah dinas yang dianggap bukan menjadi prioritas selama pandemi Covid-19. Diantaranya seperti kegiatan fisik di Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kayak rehab panti didrop, terus rehab sekolah, jadi enggak prioritas. Lalu, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya untuk BST Rp 623 miliar," kata Mujiyono saat dikonfirmasi, Selasa (13/7).

Dia menambahkan, alokasi anggaran Pemprov DKI sebesar Rp 623 miliar itu nantinya bakal disalurkan kepada penerima BST di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sedangkan bagian di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Adapun total penerima BST di DKI Jakarta sebanyak 1.805.215 kepala keluarga (KK) pada tahap pertama sebesar Rp 300ribu, yakni Januari 2021. Rinciannya, 750 ribu KK menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sedangkan 1.055.216 KK merupakan penerima BST dari Pemprov DKI. ● yan

PENGUMUMAN PENGAMBILIHAN PT. SAHABAT USAHA KITA

PT. SAHABAT USAHA KITA ("Perseroan"), Suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengumumkan bahwa :

PT. SAHABAT BUMI ALAM INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat dan Tuan AGUS ANDIYANI akan melakukan pengambilalihan saham-saham (akuisisi) milik pemegang saham pada Perseroan dan atas akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

PT. SAHABAT USAHA KITA
Alamat : Kantor Taman E.3.3 Unit A6,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot.
8.6-8.7 Wraga Kuningan,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 127 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Juli 2021

PT. SAHABAT USAHA KITA

Nyonya LENI MAYDURI ANNA WATIE

Direktur